

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TAHUN 2009**

**A. PENDAHULUAN**

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum maka Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran karyawan Commonwealth Bank mempunyai komitmen yang tinggi dan teguh dalam mengelola usaha dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Sebagai upaya dalam menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Commonwealth Bank secara berkala melakukan *Self Assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* menyangkut 11 (sebelas) aspek penilaian untuk memantau dan mengevaluasi hasil pengimplementasiannya serta merencanakan suatu tindakan (*action plan*) dan melakukan tindakan korektif (*corrective action*) bila perlu.

**B. DEWAN KOMISARIS dan KOMITE-KOMITE****1. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris per Desember 2009**

Keanggotaan Dewan Komisaris Commonwealth Bank telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam hal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh Bank Indonesia, larangan perangkapan jabatan dan juga keberadaan Komisaris Independen.

Struktur Dewan Komisaris per Desember 2009 adalah sebagai berikut :

No.	Dewan Komisaris	Jabatan	Status	TKA vs TKI (%)	
1	Garry Lynton Mackrell	Presiden Komisaris	Asing	50	50
2	Craig Carland	Deputy Presiden Komisaris	Asing		
3	Jeffrey Turangan	Komisaris Independen	Indonesia		
4	Franciskus Antonius (Alijoyo)	Komisaris Independen	Indonesia		

**2. Status Independensi Dewan Komisaris**

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum maka seluruh anggota Dewan Komisaris Commonwealth Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi atau hubungan lain.

Dengan demikian Komisaris Independen dalam hal melakukan tugas dan tanggungjawabnya tidak ada yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

**3. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Commonwealth Bank**

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memastikan setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

- b. Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, memberikan nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- c. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia dan/atau pengawasan otoritas lainnya.
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Sesuai Peraturan Bank Indonesia maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Sampai dengan Desember 2009 baru terbentuk 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

#### 4. Rapat Dewan Komisaris

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi telah dilaksanakan secara berkala selama periode tahun 2009 dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Dewan Komisaris selama periode tahun 2009 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali.

#### 5. Komite-Komite

Komite-komite yang telah terbentuk dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya adalah :

##### a). Komite Audit

Susunan anggota Komite audit adalah sebagai berikut :

No.	Komite Audit	Jabatan
1	Franciskus Antonius (Alijoyo)	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen)
2	Phillip Lewis *	Anggota (Pihak Independen)
3	Paul Hamilton	Anggota (Pihak Independen)
4	Craig Anthony Carland	Anggota

\* pengunduran diri efektif per 18 Mei 2009

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sebagai berikut :

- 1) Komite Audit bertugas untuk melakukan penelaahan atas rencana kerja SKAI, pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil-hasilnya.
- 2) Memberikan masukan secara independen kepada Dewan Komisaris terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## b). Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

No.	Komite Pemantau Risiko	Jabatan
1	Jeffrey Turangan	Ketua merangkap anggota (Komisaris Independen)
2	Phillip Lewis *	Anggota (Pihak Independen)
3	Paul Hamilton	Anggota (Pihak Independen)
4	Craig Anthony Carland	Anggota
5	Garry Lynton Mackrell	Anggota
6	Leslie Gordon Cupper	Anggota
7	Franciskus Antonius (Alijoyo)	Anggota

\* pengunduran diri efektif per 18 Mei 2009

Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

- 1) Melakukan penelaahan dan penilaian atas efektifitas dan kepatuhan penerapan kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Melakukan pemantauan dan penelaahan pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko dan unit-unit kerja Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3) Memantau perkembangan perkara litigasi yang melibatkan bank serta melakukan penelaahan atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

## C. DIREKSI

## 1. Susunan keanggotaan Direksi per Desember 2009

Keanggotaan Direksi Commonwealth Bank telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam hal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh Bank Indonesia, larangan perangkapan jabatan, tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang bisa mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Jumlah anggota Direksi per Desember 2009 adalah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 1 orang Presiden Direktur Ad Interim dan 4 (empat) orang Direktur dimana salah satu Direktornya sebagai Direktur Kepatuhan.

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akta No. 29 tanggal 10 November 2009 telah menyetujui pengunduran diri Nursing (Noersing) sebagai Presiden Direktur kemudian mengangkat Andriaan Laoh menjadi Presiden Direktur Ad Interim.

Struktur Direksi per Desember 2009 adalah sebagai berikut :

No.	Dewan Komisaris	Jabatan	Status	TKI vs TKA (%)	
1	Andriaan Laoh	Presiden Direktur Ad Interim	Indonesia	60	40
2	Preditha Dewi	Direktur	Indonesia		
3	Tuti Hartini	Direktur Kepatuhan	Indonesia		
4	Michael Paul Jarmain	Direktur	Asing		
5	Malakai Ratu Tanicuvu Naiyaga	Direktur	Asing		

## 2. Status Independensi Direksi

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia maka seluruh anggota Direksi Commonwealth Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris.

## 3. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan mengelola usaha sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi bertanggungjawab untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan jenjang organisasi.
- Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.
- Direksi mengembangkan dan memastikan penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan diseluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum maka Commonwealth Bank telah menunjuk dan menugaskan salah seorang Direksi untuk menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggungjawab memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dan patuh pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Selama tahun 2009 untuk meningkatkan penerapan fungsi kepatuhan termasuk Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

- Melakukan kajian kepatuhan untuk memberikan saran, masukan dan rekomendasi terhadap *draft* Kebijakan dan Prosedur pengembangan produk dan aktivitas baru dan/atau Kebijakan Internal lainnya

2. Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC*), analisa, evaluasi dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*PPATK*).
3. Memantau dan memastikan pelaksanaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan Bank Indonesia dan/atau otoritas lain. Serta memastikan bahwa semua laporan kemajuan dan tindakan perbaikan telah dikirim ke Bank Indonesia dan/atau otoritas lain sesuai waktu yang dijanjikan.
4. Memberikan pelatihan dan sosialisasi pemahaman Prinsip Mengenal Nasabah kepada karyawan baru dan refreshing training kepada garda depan (*front liner*).
5. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengkinian data dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester.

### **FUNGSI AUDIT INTERN**

Satuan Kerja Audit Intern (*SKAI*) bertanggungjawab langsung ke Presiden Direktur. Sesuai dengan Piagam Audit Intern, *SKAI* melaksanakan fungsi audit intern secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional.

Cakupan audit intern meliputi seluruh aktivitas Bank. Laporan hasil audit intern disampaikan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan pihak-pihak terkait lainnya (*auditee*).

Pelaksanaan rencana tindak lanjut (*corrective action plan*) yang menjadi komitmen *auditee* sebagai resolusi / perbaikan atas temuan audit dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan pihak-pihak terkait lainnya (*auditee*).

### **FUNGSI AUDIT EKTERNAL**

Sesuai rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam keputusan rapat telah disetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers sebagai auditor internal yang independen dan profesional serta wajib menjaga rahasia bank untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Commonwealth Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan tidak memberikan jasa lain kepada Commonwealth Bank sehingga terhindar dari benturan kepentingan.

## **E. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen melaksanakan pengawasan dalam penerapan Manajemen Risiko.

Beberapa tindakan telah dilakukan dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain dengan cara meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk lebih memahami dan mengenal risiko-risiko yang bisa mengancam kelangsungan operasional bank menurut Peraturan Bank Indonesia, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Hukum, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.

**F. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) per tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut :

No	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL (dalam jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	51	104.740
2	Large Exposure a. Debitur Individu b. Debitur Group	Total : a. 23 b. 25	Total Rp. a. 530,147 b. 2,254,428

Pelaksanaan ketentuan ini selalu dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*) dengan tetap mengacu pada Ketentuan Bank Indonesia tentang *Batas Maksimum Pemberian Kredit* serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Sepanjang periode tahun 2009 Commonwealth Bank tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dan pelaporannya ke Bank Indonesia selalu dilakukan tepat waktu.

**G. RENCANA STRATEGIS BANK**

Rencana Bisnis Bank disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, realistis dan terukur serta senantiasa dilakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala dalam hal pencapaiannya. Dan selama periode tahun 2009 Commonwealth Bank telah berhasil meningkatkan kinerjanya dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah target berhasil dicapai seperti penyaluran kredit, penghimpunan dana, penurunan ratio NPL.

**H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK**

Informasi Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan dengan tatacara, jenis dan cakupan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan telah disampaikan ke Bank Indonesia tepat waktu dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Bank juga telah menyajikan informasi mengenai Laporan Keuangan tersebut pada *Home Page* PT Bank Commonwealth ([www.commbank.co.id](http://www.commbank.co.id)) sehingga dengan mudah dapat diakses dan diketahui oleh seluruh *Stakeholder*.

**I. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

a. Informasi mengenai jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Commonwealth Bank selama tahun 2009 sebagai berikut

Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Sepanjang Tahun 2009			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan rupiah	Orang	Jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiers dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 (komisaris)	660	6	12.788

	lokal)			
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura	2	15	6	90
<b>TOTAL</b>	2	675	6	12.878

- b. Informasi mengenai jumlah Remunerasi (yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak penghasilan) per orang yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Commonwealth Bank selama tahun 2009 sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun Periode Tahun 2009	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
• Di atas Rp. 3 milyar	1	-
• Di atas Rp. 2 milyar sd Rp. 3 milyar	3	-
• Di atas Rp. 1 milyar sd Rp. 2 milyar	1	-
• Di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milyar	1	-
• Di bawah Rp. 500 juta	-	2 komisaris lokal

#### J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Informasi mengenai perbandingan atau ratio gaji tertinggi dan terendah yang diterima anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai (pegawai tetap sampai level pelaksana) perbulan adalah sebagai berikut :

- a. Ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 40 : 1  
 b. Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 4 : 1  
 c. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi dan terendah : 1,3 : 1  
 d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,5 : 1

#### K. SHARES OPTION

Sepanjang tahun 2009 Commonwealth Bank belum memiliki program opsi untuk membeli saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Kepala Unit Kerja Lainnya.

#### L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Berikut adalah jumlah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap termasuk honorer dan/atau outsourcing sebagai berikut :

Internal Fraud Sepanjang Tahun 2009	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	1	-	-

Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal bank & customer	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

#### M. PERMASALAHAN HUKUM

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Commonwealth Bank yang telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta yang masih dalam proses penyelesaian per posisi 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Commonwealth Bank sebagai Penggugat / Pelapor :

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum	
	Pidana	Perdata
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	-	-
• Diatas Rp. 500 juta	-	2
Dalam Proses Penyelesaian		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	-	6
• Diatas Rp. 500 juta	4	6
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

b. Commonwealth Bank sebagai Tergugat / Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum	
	Pidana	Perdata
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	-	-
• Diatas Rp. 500 juta	-	-
Dalam Proses Penyelesaian		
• Rp. 101 juta sd Rp. 500 juta	-	1
• Diatas Rp. 500 juta	-	2
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

#### N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT BC telah mempunyai Kebijakan dalam penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu *Conflict of Interest Policy* yang mengatur transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kepentingan seluruh pegawai.



**O. BUYBACK SHARE DAN BUYBACK OBLIGASI BANK**

Commonwealth Bank tidak terdapat transaksi dan/atau kegiatan *Buyback Share* dan *Buyback Obligasi Bank*.

**P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA TAHUN 2009****a. Kegiatan Sosial**

Dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat maka Commonwealth Bank turut aktif berkontribusi dengan focus pada pengembangan bidang pendidikan dan bidang olahraga

Beberapa kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2009 dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Jenis Program dan Tujuan Penggunaan	Penerima Dana	Jumlah Nominal
1	Dana Kemanusiaan CBA Group (CBA Group Humanitarian Fund) untuk gempa Tasikmalaya - Jawa Barat	Dana Kemanusiaan Kompas, 16 September 2009	AUD 100.000,-
2	Commonwealth Bank Institute of Golf untuk meningkatkan prestasi anak bangsa dalam olahraga golf	8 pemain Golf junior <18 tahun	Rp 30.690.000,- /bulan

**b. Kegiatan Politik**

Dalam kurun waktu tahun 2009 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan Politik.

**Q. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG**

Perhitungan *Nilai Komposit* dalam melakukan Self Assessment GCG telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia untuk periode tahun 2009 yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Penjelasan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	10%	1	0.10	Jumlah dan komposisi TKA vs TKI anggota Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan PBI dan mampu mengambil keputusan secara indenpenden serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai prinsip-prinsip GCG. Penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20%	1	0.20	Jumlah, kompetensi, integritas dan komposisi anggota Direksi telah sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha yang ada saat ini. Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil

					keputusan secara intern dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan dan GCG. Penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan cara pengambilan keputusan perlu disempurnakan dan ditingkatkan.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	1	0.10	Komposisi dan kompetensi anggota-anggota komite yang telah terbentuk telah sesuai dengan ketentuan PBI. Dan Komite Remunerasi dan Nominasi direncanakan akan segera dibentuk pada periode tahun 2010 dengan pertimbangan kapasitas dan kompleksitas perusahaan yang semakin bertambah.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1	0.10	Potensi terjadinya Benturan Kepentingan dapat diatasi dan diminimalkan dengan melalui Kebijakan-kebijakan yang wajib ditaati oleh seluruh karyawan Commonwealth Bank dan pihak lain yang ada kerjasama dengan pihak bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	1	0.05	Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai komitmen bersama untuk meningkatkan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Commonwealth Bank telah mempunyai Direktur Kepatuhan yang telah melalui <i>Fit dan Proper test</i> Bank Indonesia. Temuan audit Bank Indonesia terkait kepatuhan dan prinsip mengenal nasabah telah ditindaklanjuti dan akan selalu menjadi perhatian dalam pelaksanaan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	1	0.05	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern telah berjalan efektif sesuai dengan <i>Standard Minimum</i> yang ditetapkan dalam SPFAIB.

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	1	0.05	Pelaksanaan Fungsi Audit Extern dilaksanakan sangat efektif oleh Akuntan Publik / KAP yang independen dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.5%	2	0.15	Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko Bank dan manajemen aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> )	7.5%	1	0.08	Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan penyediaan dana besar ( <i>large exposure</i> ) dalam pelaksanaannya termasuk dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan dengan independen sesuai dan memenuhi ketentuan BI tentang BMPK.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15%	3	0.45	Laporan Keuangan dan Non Keuangan diinformasikan secara transparan dan mudah untuk diakses oleh stakeholder melalui media dan homepage. Laporan pelaksanaan dilaporkan GCG sesuai ketentuan PBI dan tepat waktu. Sistim Informasi Manajemen terkait Penyusunan Laporan Internal dalam proses penyempurnaan agar dapat menyediakan data tepat waktu, akurat dan lengkap.
11	Rencana Strategis Bank	5%	1	0.05	Penyusunan Corporate Plan untuk jangka panjang dan Rencana Bisnis untuk jangka pendek telah disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal, internal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
<b>Total Nilai Komposit</b>		<b>100%</b>		<b>1.38</b>	<b>TATA KELOLA UNGGULAN</b>

**R. Penutup**

Demikianlah Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini kami buat, selanjutnya bimbingan serta pengarahan Bank Indonesia senantiasa kami harapkan guna perbaikan implementasi *Good Corporate Governance* di Bank kami.

**PT Bank Commonwealth**

Andriaan Laoh  
Presiden Direktur Ad Interim

Jeffrey Turangan  
Komisaris